

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2011. *Politik Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Achmad Ali. 1998. *Menguak Tabir Hukum, Suatu kajian Filosofis Dan Sosiologis*, Jakarta: Chandra Pratama.
- Bagir Manan. 1994. *Pemahaman Mengenai Sistem Hukum Nasional (Makalah)*.
- Bayu Dwi Anggono. 2014. *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo. 2009. *Cara Praktis Menyusun dan Merancang Peraturan Daerah (Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris)*, Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Somardi. 2007. *Teori Umum Hukum dan Negara Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik (terjemahan General Theory of Law and State Hans Kelsen)*, Jakarta: Bee Media Indonesia.
- Hamid Attamimi. 1991. *Pancasila Cita Hukum dalam Kehidupan Hukum Bangsa Indonesia*, Jakarta: BP7 Pusat.
- Imam Syaukani dan A.Ahsin Thohari. 2007. *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Janpatar Simamora, *Multitafsir Pengertian "Ihwal Kegentingan yang Memaksa" dalam Penerbitan Perppu*, (Jurnal Mimbar Hukum UGM Yogyakarta, Volume 22 Nomor 1, Februari 2010).
- Jazim Hamidi, dkk. 2009. *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media.
- Jimly Asshiddiqie, M. Ali Safa'at. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reforganisasi masyarakat*, hlm. 212-213. Lihat juga Delvi Suganda, *Mekanisme Judicial Review terhadap Qanun Aceh*, hlm. 22.
- _____. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2001. *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- _____. 2010. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Manunggal K. Wardaya, *Perubahan Konstitusi Melalui Putusan Mahkamah Konstitusi: Telaah Atas Putusan Nomor 138/Puu-Vii /2009*, *Jurnal Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Volume 7 Nomor 2, April 2010.
- Maria Farida Indrati S. 2007. *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: PT Kanisius.
- Moh. Mahfud MD. 2010. *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Natabaya. 2006. *Sistem Peraturan Perundang-Undang di Indonesia*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Notonagoro, 1984. *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria Di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Padmo Wahyono. 1986. *Indonesia Berdasarkan atas Hukum (cetakan II)*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Philippe Nonet and Philip Selznick. 2008. *Hukum Responsif*, diterjemahkan oleh Raisul Mutthaqien, Bandung: Nusamedia.
- Regen B.S. 2006. *Politik Hukum*, Bandung: Utomo.

- Satya Arinanto. 2006. *Politik Hukum Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi (Pidato Pengukuhan Guru Besar FHUI)* Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- _____. 2010. *Kumpulan Materi Presentasi Hukum (dikumpulkan dari berbagai referensi)*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Sunaryati Hartono. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu System Hukum Nasional*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Yuliandri. 2011. *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wiwin Sri Rahyani. 2011. *Pencabutan terhadap Perppu Pasca Penolakan dari DPR RI dalam Sistem Hukum Nasional*, Tesis.
- Zen Zanibar. 1997. *Regulasi dan Konfigurasi Politik di Indonesia (Suatu Tinjauan Dari Sudut Hukum Tata Negara)*, Jakarta: Universitas Indonesia.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Tahun 1945*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, LN No.112 Tahun 2001.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, LN No.82 Tahun 2011, TLN No.5234.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan*, LN No.116 Tahun 2013, TLN No.5430.
- Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-*

Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, LN No.138 Tahun 2017, TLN No.6084.

Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, LN Nomor 199 Tahun 2014*

Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, LN Nomor 1071 Tahun 2015*

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 perihal Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*

Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6-13-20/PUU-VIII/2010 perihal Pengujian atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik.*